

**PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP
EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN
KOTA TENGAH**

**Oleh:
MUTMAINNAH PUTRI NANSER
NIM: S.2119012**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH

Oleh:

MUTMAINNAH PUTRI NANSER

NIM: S2119012

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Telah Disetujui dan Siap Diseminarkan
Gorontalo, 20 November 2023

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

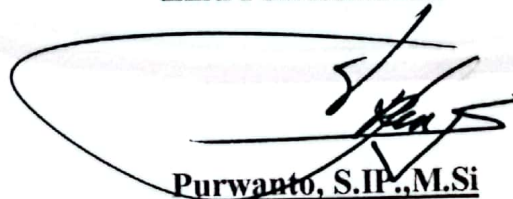
Pembimbing II



Muhammad Riadi P. Sono, S.IP., M., Si
NIDN: -

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH

Oleh:

MUTMAINNAH PUTRI NASNER



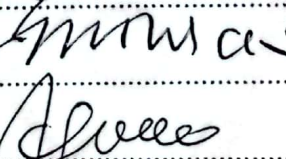
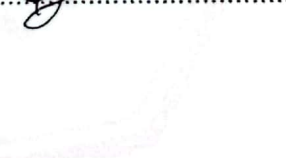
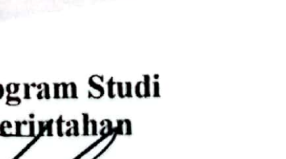
NIM: S2119012

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

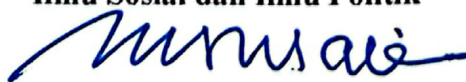
Komisi Penguji :

1. Dr. Sukarman Rahim, M.Si
2. Hasan Bau, S.E., M.Si
3. Fadlih Awwal Hasanuddin, S.IP., M.I. Kom
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I. Pem., M.Si
5. Muhammad Riadi Prasetyo Sono, S.IP., M.Si



:.....

:.....

:.....

:.....

:.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I. Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN :0926096601

Pernyataan

Dengan ini saya nyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo,.....2023

Yang membuat pernyataan


Mutmainnah Putri Nanser
NIM : S211912

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of transparency on the effectiveness of the distribution of social assistance to the community in Liluwo Village, Kota Tengah District. In this research, researchers used survey research with a quantitative approach; namely research using words or sentences as well as images and numbers, using samples and questionnaires as the main data collection tools. Determining the sample uses an accidental technique, namely determining the sample based on spontaneity factors, meaning that anyone who happens to meet the researcher and according to their characteristics (traits) can be used as a sample (respondent), namely as many as 40 people.

The research results show that transparency can contribute to the effectiveness of the distribution of community social assistance in Liluwo Village. The main problem related to the effectiveness of the distribution of social assistance is the accuracy of data about people who meet the requirements to receive social assistance.

Key words: transparency, effectiveness of social assistance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif; yakni penelitian menggunakan kata-kata atau kalimat serta gambar dan angka, menggunakan sampel dan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. Penentuan sampel menggunakan teknik aksidental yakni penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan menurut ciri-cirinya (traits) dapat dijadikan sampel (responden), yakni sebanyak 40 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo. Persoalan utama terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial yakni keakuratan data tentang masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial.

Kata kunci :transparansi, efektivitas bantuan sosial.

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrohmanirrohm

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhahana Wataala, serta salam dan taslim ke junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, atas perjuangan yang mengantarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH.

Banyak tantangan dan hambatan dan kesulitan yang dialami penulis, namun berkat arahan dan masukan dari dosen pembimbing, alhamdulillah semua ini dapat diselesaikan. Namun, apabila dalam penulisan ini masih ada kesalahan, dengan kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai manusia biasa, penulis juga tidak pernah luput dari kesalahan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan, baik moril maupun material serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda serta ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis.

2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si, sebagai pembimbing I dan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo., yang telah memberikan koreksi perbaikan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Moh. Riadi P. Sono, S.IP., M.Si, selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan koreksi perbaikan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Purwanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Seluruh Dosen, terutama Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan isi dalam Skripsi ini, dan semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Oktober
2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepemerintahan yang baik (good governance).....	7
2.2 Konsep transparansi	9
2.3 Konsep efektivitas	13
2.4 Penyaluran bantuan sosial	16
2.5 Hubungan transparansi dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat	19
2.6 Kerangka pikir.....	20
2.7 Hipotesis.....	22

BAB OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	24
3.2 Metode penelitian	24

3.2.1 Desain penelitian.....	24
3.2.2 Operasionalisasi variabel	24
3.2.3 Populasi dan sampel.....	27
3.2.4 Prosedur pengumpulan data	28
3.2.5 Prosedur penelitian	28
3.2.6 Teknik analisis data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Visi dan misi	34
4.1.2 Tugas pokok dan fungsi.....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.3 Analisis Deskriptif.....	42
4.3.1 Transparansi (variabel X).....	42
4.3.2 Efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)...	46
4.4 Pengujian Hipotesis	51
4.5 Pembahasan.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel X dan Y.....	25
Tabel 3.2 Bobot nilai variabel.....	27
Tabel 3.3 Interpretasi koefisien korelasi.....	30
Tabel 4.1 Uji validitas transparansi (variabl X).....	39
Tabel 4.2 Uji validitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabl Y)	39
Tabel 4.3 Uji reliabilitas transparansi (variabel X)	40
Tabel 4.4 Uji reliabilitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y).....	41
Tabel 4.5 Aparatur kelurahan memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan....	43
Tabel 4.6 Aparatur kelurahan menjelaskan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial	43
Tabel 4.7 Aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami	44
Tabel 4.8 Prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami	44
Tabel 4.9 Ada informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme).....	45
Tabel 4.10 Ada informasi tentang daftar nama-nama penerima bantuan sosial....	46
Tabel 4.11 Aparatur kelurahan memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial	47
Tabel 4.12 Aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial....	47
Tabel 4.13 Aparatur kelurahan bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial.	48
Tabel 4.14 Aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial	48

Tabel 4.15 Warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang memenuhi persyaratan	49
Tabel 4.16 Warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu....	40
Tabel 4.17 Warga masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah	50
Tabel 4.18 Warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin.....	51
Tabel 4.19 Korelasi (correlations)	52
Tabel 4.20 Tingkat signifikansi antara transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)	53
Tabel 4.21 Koefisien transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)....	55
Tabel 4.22 Daftar penerima bansos.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu tugas pemerintah yang diamanatkan dalam konstitusi yakni memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan sosial warga masyarakat. Untuk itu, berbagai terobosan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah kepada setiap daerah merupakan salah satu kebijakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan otonomi daerah berarti pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah yang diberi kewenangan yang luas. Namun dalam perjalanannya, masih tetap ditemui adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Hal ini tentunya berdampak pada masih banyaknya warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan atau masih tidak sejahtera. Permasalahan semakin rumit dengan adanya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana wabah penyakit corona disease 19 (virus korona atau covid 19). Berbagai permasalahan tersebut, tentunya harus disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang sangat populer yang diambil oleh pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat ialah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang belum beruntung dari aspek ekonomi keluarganya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Bantuan

sosial dari pemerintah tersebut yang telah berikan kepada warga masyarakat tersebut yakni jaring pengaman sosial (JPS), program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), iuran jaminan kesehatan nasional (Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan subsidi listrik, dan bantuan lain untuk masyarakat miskin. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tahun 2012 bantuan sosial yang disingkat bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai jenis bantuan sosial tersebut diberikan kepada warga masyarakat yang kurang mampu dari aspek ekonomi, agar mereka tidak semakin terpuruk. Namun dalam kenyataannya dari berbagai informasi, baik media cetak maupun media elektronik, berbagai permasalahan muncul dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, seperti sosialisasi yang kurang efektif, pendataan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan sosial namun tidak didata, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan lain-lain. Banyaknya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi, bahkan hampir di seluruh daerah, kasusnya hampir sama. Padahal penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, bukan merupakan hal yang baru dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah.

Munculnya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat, umumnya terjadi pada tingkat bawah, yakni di desa atau kelurahan. Kurang efektifnya sosialisasi dan kekurangakuratan data warga masyarakat calon penerima bantuan, menjadi alasan utama banyak masalah dalam penyaluran bantuan sosial. Demikian juga halnya yang terjadi Kota Gorontalo, penyaluran bantuan sosial masih banyak menimbulkan masalah, seperti yang terjadi di Kelurahan Liluwo yang dijadikan tempat penelitian.

Dari informasi yang diberikan salah seorang tokoh masyarakat setempat, permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial lebih banyak disebabkan karena tidak akuratnya data penerima bantuan sosial. Menurut tokoh masyarakat tersebut, dalam menentukan warga penerima bantuan sosial harus dilakukan validasi data warga penerima bantuan terlebih dahulu agar ada jaminan bahwa bantuan sosial yang akan diterima warga bisa bermanfaat untuk warga masyarakat yang dikategorikan kelompok miskin (penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (ketentuan BPS, garis kemiskinan Maret 2023 ialah Rp. 550.458, artinya penduduk dengan jumlah pengeluaran kurang dari Rp. 550.458 dikategorikan miskin). Verifikasi data juga penting dilakukan untuk memastikan jumlah penerima bantuan sosial, karena mungkin saja jumlahnya bisa bertambah atau sebaliknya jumlahnya berkurang karena ada yang meninggal, pindah alamat, atau warga yang baru masuk kategori miskin karena terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Di samping itu, permasalahan lain terkait bantuan sosial di Kelurahan Liluwo, yakni adanya penerima ganda bantuan

sosial, yakni ada warga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH (program keluarga harapan) tetapi juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial non PKH. Menurut skema pemberian bantuan sosial, bahwasannya program bantuan sosial Non PKH, diberikan hanya kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. Namun yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa kepala keluarga yang mendapatkan kedua program sosial tersebut.

Banyaknya permasalahan dalam penyaluran bantuan tersebut diakibatkan karena kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan tersebut. Transparansi dalam penyaluran bantuan sosial harus diwujudkan dalam wujud kebebasan aliran informasi berbagai proses pemberian bantuan sosial, mulai dari proses pendataan sampai kepada penyalurannya. Informasi terkait bantuan sosial harus dapat diakses secara bebas oleh warga yang membutuhkannya, dan yang lebih penting lagi, informasi tersebut harus tersedia secara memadai dan mudah dimengerti oleh warga masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi, agar permasalahan tentang persyaratan, warga yang berhak sebagai penerima, warga yang telah meninggal namun masih terdata sebagai penerima, dan lain-lain dapat diperkecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2016) yang mengatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan tata kelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait.

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Transparansi menuntut adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

1.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

1.4. Manfaat penelitian

Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep transparansi, efektivitas dan bantuan sosial masyarakat.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Lurah Liluwo dan aparat kelurahan, dalam mewujudkan transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

c) Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti terkait konsep *good governance*, transparansi, dan penyaluran bantuan sosial dengan kenyataan yang ada terjadi di tempat penelitian. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut *good governance*, transparansi, dan penyaluran bantuan sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepemerintahan yang baik (good governance)

Penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri. Penerapan pemerintahan yang baik atau *good governance* bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga organisasi pelaku bisnis di sektor swasta dan organisasi masyarakat madani. Sebagai bagian dari proses reformasi, pelaksanaan pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah itu sangat menentukan apakah reformasi akan berjalan terus atau berjalan di tempat.

Bank dunia (*world bank*) dalam Mulyadi dan Gedeona (2017;37) mengatakan bahwa *governance* sebagai cara suatu negara untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Definisi ini mengarah pada penggunaan kekuasaan diantara elemen-elemen pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan daerah, penggunaan kekuasaan dibolehkan dalam upaya untuk mengelola sumber daya alam daerah yang digunakan untuk kemajuan dan pembangunan di daerah, sebagai upaya mewujudkan hegemoni atas warga masyarakat.

Kemudian, Natakusumah (2017) mengatakan *good governance* atau tata kelola yang baik merupakan kesepakatan pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, perlu terjalin dialog antar pemangku kepentingan utama dalam bernegara, sehingga semua pihak merasa memiliki sistem pemerintahan bagi kehidupan pemerintahan. Tanpa konsensus yang muncul dari dialog ini, kesejahteraan tidak dapat tercapai karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat terhambat.

Selanjutnya, Adisasmita (2016:38) mengatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance adalah transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal.

1. Transparansi

Singkatnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib menyediakan informasi akuntansi, termasuk informasi pelaporan keuangan, dan informasi lain yang digunakan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2. Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggara pemerintahan. Dalam kenyataannya, ini tentang tanggung jawab pemerintah daerah dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyediakan informasi untuk melaksanakan hak masyarakat untuk mengetahui, dan menyampaikan keinginannya. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menginformasikan dan melaporkan kegiatan ekonomi

dan hasil pemerintah daerah, yang memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Efisiensi dan efektivitas

Dalam era otonomi daerah, efisiensi dan efektivitas merupakan jembatan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Efisiensi dan efektivitas ini harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Akuntansi sektor publik yang baik diperlukan untuk mendukung pengelolaan dana publik berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan salah satu komponen good governance. Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, terkait semua aspek pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya kejelasan tentang kewajiban atau syarat-syarat, kejelasan segala yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

2.2 Konsep transparansi

Singkatnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas yang membutuhkan informasi. Penyedia layanan wajib menyediakan informasi yang digunakan oleh pihak terkait dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan

politik melalui informasi akuntansi, termasuk dalam bentuk laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penyedia layanan, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk menerima dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang perekonomian daerah. Keterbukaan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang pemerintahan, terutama informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor (Kristianten dalam Mardiasmo, 2016:45) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan, yaitu masyarakat.

Menurut Iqbal (2015:366) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menginformasikan terkait pengelolaan sumber daya publik kepada entitas yang membutuhkan informasi. Direksi harus memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan. Kemudian Ardianto (2007) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan yang serius dan inklusif, memberikan ruang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi pemerintah mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam membentuk kebijakan sehingga pembuat undang-undang dan masyarakat mengetahui

dan memantaunya. Akhirnya, transparansi menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan publik. Hal ini menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan tanggap terhadap keinginan dan kepentingan rakyat. Transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap kegiatan pemerintah di masyarakat.

Selanjutnya, Hikmat (2016:13), menyatakan bahwa transparansi dalam administrasi publik memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau kemajuan dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang diumumkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah merupakan faktor penting dalam pembangunan negara. Transparansi dan keterbukaan yang diterapkan pemerintah dapat meminimalisir tingkat korupsi yang telah menjadi penyakit kronis di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, transparansi pemerintah menjadi isu utama yang dibahas oleh masyarakat internasional dalam perjalanan menuju tata pemerintahan yang baik.

Muis (2020) mengatakan bahwa transparansi menjelaskan aturan, rencana, proses dan implementasi untuk mengetahui mengapa, bagaimana, apa dan berapa banyak. Transparansi memastikan bahwa pejabat, manajer, anggota dewan, dan pemberi kerja dapat melaporkan aktivitas mereka, sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemberi pelayanan. Nantinya, konsep akuntabilitas digunakan untuk menanggapi kewajiban pemerintah, menyajikan informasi tentang keputusan dan bagaimana implementasinya kepada publik dan lembaga yang bertanggung jawab yang memberikan pengawasan, menasihati publik, atau lembaga

yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dapat menetapkan pelanggaran atau sanksi. sebaliknya, untuk memperbaiki perilaku buruk.

Adapun, Dwiyanto (2010) mengatakan setidaknya ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu:

- a) Keterbukaan. Mengukur keterbukaan proses pemberian pelayanan publik. Penilaian keterbukaan mencakup seluruh proses pelayanan publik, termasuk persyaratan, biaya yang terlibat, durasi, dan mekanisme dan prosedur penyampaian yang akan dilaksanakan. Ketentuan penggunaan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh pengguna. Penyedia layanan harus berusaha untuk menjelaskan kepada pengguna persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan.
- b) Aturan dan prosedur layanan mudah dipahami. Pentingnya dipahami bukan hanya arti harfiahnya, tetapi juga pentingnya semua prosedur dan aturan yang ditetapkan. Menjelaskan persyaratan, prosedur, biaya, dan durasi sangat penting bagi pengguna. Ketika semua rasionalitas ini diketahui dan diterima oleh pengguna, kepatuhan dengan prosedur dan aturan mudah dicapai.
- c) Informasi tentang berbagai aspek pelayanan publik sudah tersedia. Semakin mudah bagi pengguna untuk menemukan berbagai aspek pemberian layanan publik, semakin besar transparansi.

Di sisi lain, Krina (2013:13) menyatakan bahwa transparansi adalah asas yang menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi, dan terjaminnya kemudahan akses informasi merupakan

syarat penting bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus proaktif dan menginformasikan sepenuhnya kepada masyarakat tentang kebijakan dan layanan yang mereka berikan.

Selanjutnya, Adisasmita (2017:39) mengatakan transparansi ialah kesediaan aparat pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola sumber daya yang berkaitan dengan masyarakat kepada pimpinan yang lebih tinggi dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi yang diberikan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.3 Konsep efektivitas

Konsep efektivitas banyak dimaknai para ahli dari berbagai sudut pandang, tergantung dari sudut pandang siapa yang menilainya. Ada ahli yang memaknai efektivitas terkait kuantitas dan kualitas atau output barang dan jasa. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dihasilkan, sehingga jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat yang berakibat gagalnya pencapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka situasi tersebut dikatakan tidak efektif.

Ndraha (2013:297) mengatakan bahwa efektifitas berasal dari kata efektif yang merupakan kata serapan bahasa Inggris *effective*, yang artinya tepat atau pas sesuai dengan yang diinginkan tanpa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Istilah efektifitas dapat diartikan sebagai suatu sifat dari kegiatan yang sesuai dengan

harapan dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dengan kata lain, efektifitas dapat diketahui melalui variabel harapan/tujuan, proses dan hasil (*output*).

Menurut Emerson dalam Handayani (2019:16) efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Jelas efektif bila tujuan atau sasaran telah tercapai seperti yang direncanakan sebelumnya. Jadi jika tujuan atau sasaran tidak terpenuhi dalam waktu tertentu, pekerjaan itu tidak efektif

Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat dikatakan bahwa konsep efektifitas berkenaan dengan tingkat atau derajat pencapaian tujuan dan misi organisasi. Dari pendapat ahli tersebut tercantum hasil yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur secara matematika, misalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Jadi pengukuran efektifitas adalah menyangkut upaya untuk mengukur keberhasilan suatu program atau hasil yang diinginkan.

Etzioni dalam Wibawa (2014:27) memberikan pengertian konsep efektivitas sebagai tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi; sedangkan efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan organisasi untuk menghasilkan output. Pada kenyataannya, kedua konsep ini saling berhubungan dan bergantung. Setiap organisasi berusaha memperoleh keduanya. Desain dan struktur organisasi, teknologi yang dipakai, manfaat yang ingin diwujudkan, pertumbuhan organisasi dan pengembangan sumber daya insani, semua ini diarahkan untuk meraih kondisi efektif dan efisien tersebut.

Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi

atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Disisi lain, Beni (2016) mengatakan bahwa efisiensi juga berkorelasi dengan tingkat keberhasilan operasi publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan memberikan pelayanan sosial yang menjadi tujuan utama (*in the goal*).

Samson dalam Wibawa (2014:28) memberikan definisi yang agak berbeda. Menurutnya, dimensi-dimensi efektivitas adalah sebagai berikut: a) *goal attainment*, yakni kemampuan manajer untuk mewujudkan kebutuhan ekonomis bagi para anggotanya; b) *adaptation*, yakni usaha untuk mencangkokkan diri pada lingkungan. Misalnya, mengantisipasi kebijaksanaan pasar; c) *integration*, yakni sejauhmana manajer mampu menyatukan berbagai departemen dan fungsi di dalam organisasinya. Contoh item yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah : apa metode yang dipakai untuk menentukan jumlah, kualitas dan beban kerja para buruh; berapa jumlah buruh yang keluar tiap tahun; d) *latency*, yakni langkah yang diambil untuk menjaga komitmen dan partisipasi para anggota organisasi.

Dari sudut pandang ahli efisiensi, dapat ditegaskan bahwa efisiensi dalam proses pemrograman tidak boleh mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga efisiensi untuk mencapai keberhasilan program yang dilaksanakan dapat tercapai, dengan memperhatikan yang diinginkan. kualitas. penampilan sesuai dengan program.

2.4 Penyaluran bantuan sosial

Sitanggang dkk. (2014) mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) adalah pemberian santunan secara sementara dan selektif berupa pemberian atau barang baik dari pemerintah maupun lembaga kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat umum dengan tujuan melindungi dari kemungkinan ancaman sosial. Kemudian Sianturi (2017) mengatakan bahwa dukungan penghidupan adalah dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada individu, kelompok, keluarga atau komunitas dalam bentuk uang atau barang yang tidak berkelanjutan atau tahan lama untuk memungkinkan perlindungan. terhadap risiko sosial yang mungkin terjadi. Sementara itu, menurut Winarta dkk. (2020) adalah bantuan sementara kepada orang miskin yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Purwanto (2020), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial adalah suatu cara pemberian manfaat finansial atau natura secara selektif dan terputus-putus kepada masyarakat atau organisasi profesi yang tujuannya untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, ditetapkan bahwa Departemen Kesejahteraan bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Membantu Presiden dalam mengurus administrasi negara dan barang milik. Bantuan hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu bersifat sementara atau terputus-putus. Dukungan yang diberikan bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu dapat hidup seimbang (Departemen Sosial, 2011).

Berdasarkan pasal 23 Permendagr 32 Tahun 2011, ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada perseorangan, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam dalam rangka mencapai usia minimum untuk mencapai dan lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang bertugas melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan risiko sosial.

Selain itu, pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyebutkan bahwa pemberian bantuan hidup merupakan segala upaya untuk mengurangi penderitaan. Melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memperkuat potensinya untuk menghindari gangguan sosial dan memungkinkan seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas yang menderita kerentanan untuk melanjutkan kehidupan normal. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) ditawarkan sebagai berikut:

a. uang; b. barang; dan/atau c. pelayanan

Pemerintah daerah memperhatikan asas keadilan, legalitas, rasionalisme dan kepentingan masyarakat. Bantuan sosial untuk anggota/kelompok masyarakat sebagai berikut:

- a) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam, berada dalam keadaan tidak stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

- b) Lembaga pendidikan, keagamaan, dan non-pemerintah lainnya yang misinya melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan risiko sosial.

Agar memenuhi syarat untuk tunjangan pendapatan, pemohon harus memenuhi yang berikut:

- a) Masyarakat/kelompok mengirimkan usulan tertulis kepada pimpinan daerah,
- b) Kepala daerah menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang untuk mengevaluasi proposal tertulis. Jika kepala SKPD yang bersangkutan setuju, rekomendasi diteruskan kepada Direktur Daerah melalui Tim Anggaran Administrasi Daerah (TAPD).
- c) TAPD mempertimbangkan rekomendasi sesuai dengan prioritas daerah dan kemungkinan keuangan.
- d) Rekomendasi Kepala SKPD dan hasil pengamatan TAPD menjadi dasar penggabungan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial dalam Kebijakan Umum (KUA) dan Pagu Anggaran Prioritas dan Peralihan (PPAS) APBD.
- e) Bantuan pendapatan yang dibayarkan secara tunai dianggarkan ke dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja penunjang pendapatan, objek belanja penunjang pendapatan dan objek belanja PPKD. Berdasarkan daftar penerima kesejahteraan yang terdaftar yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, tidak termasuk kesejahteraan individu dan keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran bantuan penghasilan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan

berdasarkan permintaan tertulis dari individu atau keluarga yang bersangkutan atau pendapat pejabat yang berwenang dan disetujui oleh Direktur Daerah setelah meninjau SKPD terkait.

Dari berbagai macam sumber yang dijelaskan tersenut tentang transparansi, sangat diharapkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk mengaktualisasikan penerapan transparansi penyaluran dana bansos di tingkat kelurahan dan desa, khususnya penyaluran bansos di Kelurahan Liluwo. Banyaknya hambatan dan tantangan dalam penerapan transparansi penyaluran bansos ini menjadi tanggungjawab besar pemerintah kelurahan dalam menerapkan keadilan dalam penyaluran dana bansos demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

2.5 Hubungan transparansi dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat

Transparansi sangat dibutuhkan dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat agar dapat diketahui dengan cepat tentang syarat-syarat warga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Permasalahan yang muncul selama ini dalam dalam penyaluran bantuan sosial, seperti kurang tepat sasaran, ada warga yang menerima dua jenis bantuan, warga yang telah meninggal atau pindah domisili tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan, dan lain-lain, adalah disebabkan karena kurangnya transparansi penyaluran bantuan, sehingga kurang dapat diawasi secara akurat.

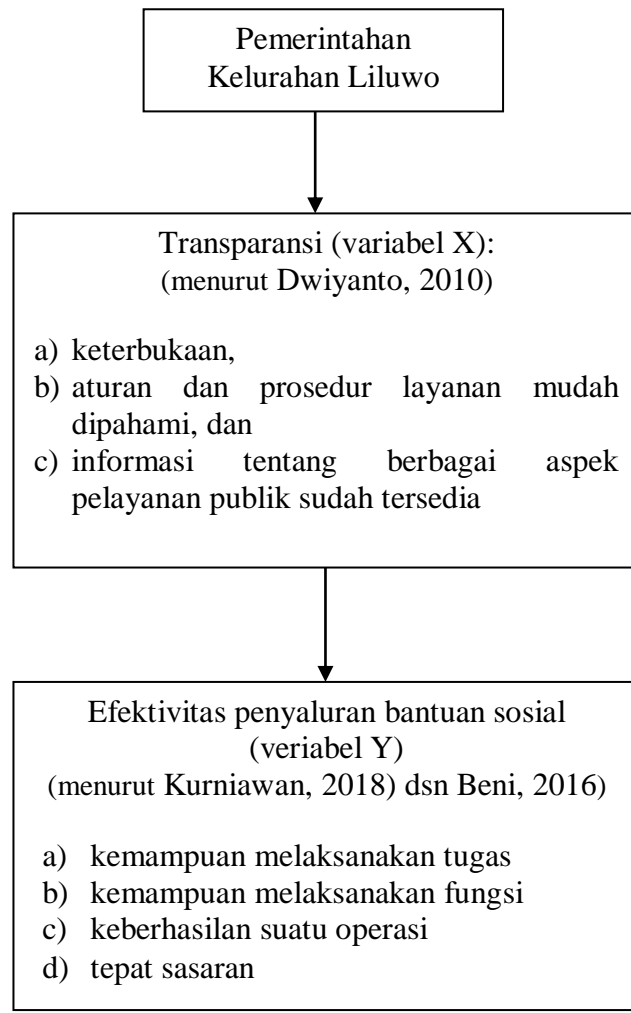
Menurut Nisak (2017) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang pemerintahan, terutama informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola organisasi, khususnya informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh suatu organisasi. Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang akan dihadapi ialah kontrol dari masyarakat, sehingga diharapkan bantuan informasi dari masyarakat terkait nama-nama penerima bantuan sosial, sehingga segala sesuatu yang menyangkut warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, dapat segera direvisi kalau ada kesalahan.

2.6 Kerangka pikir

Transparansi dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sangat menentukan efektivitas penyalurannya, artinya akan tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena warga masyarakat juga akan turut mengawasi penyalurannya karena adanya informasi yang lengkap terkait bantuan sosial, sehingga aparat pemerintah kelurahan akan mendapat bantuan informasi dari masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Untuk variabel X (transparansi) digunakan pendapat Dwiyanto (2010) yang mengatakan setidaknya ada

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yaitu: a) keterbukaan, b) aturan dan prosedur layanan mudah dipahami, dan c) informasi tentang berbagai aspek pelayanan publik sudah tersedia. Sedangkan untuk variabel Y (efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat) digunakan pendapat Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya, dan Beni (2016) yang mengatakan bahwa suatu aktivitas bisa dikatakan efektif bila aktivitas tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang menjadi sasaran utama (tepat sasaran). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:



Bagan kerangka pikir

2.7 Hipotesis

Hipotesis menurut Riduwan (2020:35) adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah:

Ho: Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Luluwo Kecamatan Kota Tengah.

Ha: Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. Penelitian direncanakan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif; yakni penelitian menggunakan kata-kata atau kalimat serta gambar dan angka, menggunakan sampel dan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama.

Menurut Singarimbun dan Effendi (2016:3) bahwa metode pendekatan survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian kuantitatif menurut Arikunto (2016:12) sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

3.2.2. Operasionalisasi variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran maka operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

	c) tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - aparaturn kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial - warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang memenuhi persyaratan - warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu
	d) keberhasilan suatu operasi	<ul style="list-style-type: none"> - warga masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah - warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin

Dalam melakukan test terhadap variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada responden disusun dengan menyiapkan 5 pilihan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Bobot nilai variabel

Pilihan	Bobot
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Kurang setuju (KS)	2
Tidak setuju (TS)	1

3.2.3. Populasi dan sampel

3.2.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono dalam Riduwan (2020:54) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat penerimaan bantuan soaial di Kelurahan Liluwo.

3.2.3.2. Sampel

Sugiyono dalam Riduwan (2020:56) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk anggota masyarakat penarikan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu warga masyarakat yang tau mengenai bantuan sosial masyarakat. Setelah

peneliti mengedarkan kuesioner selama satu bulan, ada sebanyak 40 orang yang mengembalikan kuesioner.

3.2.4. Prosedur pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut

1. Kuesioner, adalah teknik pengambilan data dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan pada anggota sampel yang bersedia memberikan respons (responden) atau jawaban.
2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dialog dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.5. Prosedur penelitian

Tentunya untuk mendapatkan data yang baik dari segi realisme diperlukan instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang terpenting alat ukur yang valid dan terpercaya. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas alat atau alat ukur, maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat sebelum digunakan, sehingga memberikan informasi yang objektif pada saat digunakan.

3.2.5.1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Menurut Arikunto (2016:219) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Selanjutnya

dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- X = variabel bebas (Independent)
- Y = variabel terikat (Dependent)
- n = banyaknya sampel

Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t = nilai t hitung
- n = jumlah responden
- r = koefisien korelasi hasil r hitung

Selain itu, angka korelasi yang ditentukan menggunakan hasil perhitungan diubah menjadi nilai t-student dan dibandingkan dengan t-tabel dengan (n-2) derajat kebebasan pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, query dianggap valid. Jika t-score kurang dari atau sama dengan nilai t-

tabel, maka soal dianggap tidak valid. Dalam penelitian ini, taraf signifikansi sebesar 5%. Sementara itu, tentukan validitas kekuatan atau kekuatan korelasi masing-masing variabel dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Interpretasi koefisien korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,80-1,000	Sangat kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup kuat
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat rendah

3.2.5.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten bila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain, keandalan adalah indeks seberapa andal atau dapat dipercaya sebuah meteran. Meter digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan nilai yang diperoleh relatif konsisten

Uuji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik *Alfa Cronbach (a)* dilakukan untuk jenis data interval yang telah memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel $\geq 0,60$ atau 60%.

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (α) yaitu :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{a1^2} \right)$$

Dimana :

α = Relibilitas instrument

k = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$ = Jumlah pertanyaan

$a1^2$ = Total varians

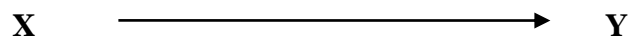
3.2.6. Teknik analisis data

3.2.6.1. Rancangan uji hipotesis

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Metode Regresi Sederhana



Keterangan:

X = Transparansi

Y = Efektivitas penyaluran bantuan sosial

3.2.6.2. Pengujian hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif-kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dari responden, khususnya dari kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan ke dalam tabel frekuensi dan persentase. Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana (Riduwan, 2020:145) dengan formulasi sebagai berikut:

Persamaan regresi :

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= a + b X \\ a &= \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} \\ b &= \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}\end{aligned}$$

Keterangan:

X = Transparansi

Y = Efektivitas penyaluran bantuan sosial

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0

b = Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Sedangkan untuk mengetahui derajat/besarnya hubungan antara transparansi (variabel X) dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial (variabel Y), digunakan

Korelasi Pearson Product Moment dalam Riduwan (2020:136) dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2 - (\sum X)^2) \cdot ((n \sum Y^2 - (\sum Y)^2))}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

X = Transparansi

Y = Efektivitas penyaluran bantuan sosial

Korelasi PPM ditunjukkan dengan (r) kecuali nilai r lebih besar dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Jika nilai $r = -1$ berarti korelasinya benar-benar negatif; $r = 0$ berarti tidak ada korelasi; dan $r = 1$ berarti korelasinya kuat. Sedangkan arti dari nilai r dijelaskan dengan tabel interpretasi nilai r . Selain itu, untuk menyatakan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y , dapat ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan : KP = Nilai koefisien determinan

r = Nilai koefisien korelasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Visi dan misi

Visi:

Kota SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik).

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata kelola melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah
- b) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi

1) Lurah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah fungsi dari lurah:

- a. Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;

- c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2) Sekretaris

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian. Berikut adalah fungsi dari sekretaris:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Seksi pemerintahan dan kemasyarakatan

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah fungsi dari seksi pemerintahan dan kemasyarakatan:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- i. Pengumpulan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;

- j. Pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
- k. Pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- l. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan

4) Seksi ekonomi dan pembangunan

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Berikut adalah fungsi dari seksi ekonomi dan pembangunan.

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan kelurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
- e. Pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

5) Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.

Berikut adalah fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di kelurahan.

4.2 Hasil Penelitian

Daftar pernyataan/kuesioner merupakan data primer yang sangat menunjang dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah daftar pernyataan/kuesioner yang telah disiapkan dapat mengukur variabel yang akan diukur.

4.1.1 Hasil uji validitas

Kuesioner yang diberikan kepada responden telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing daftar pernyataan/kuesioner dengan skor totalnya.

Berikut adalah hasil uji validitas pernyataan/kuesioner. Hasil pengujian validitas kuesioner melalui koefisien korelasi Pearson, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Uji validitas transparansi (variabel X)

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel = 0,325	Keputusan
Transparansi (X)	1	0.646	0,320	Valid
	2	0.741	0,320	Valid
	3	0.777	0,320	Valid
	4	0.695	0,320	Valid
	5	0.744	0,320	Valid
	6	0.708	0,320	Valid

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Tabel 4.1 tentang uji validitas transparansi (variabel X) yang berisi enam pertanyaan yang diberikan kepada responden, dapat diketahui hasilnya yakni semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai t tabel = 0,320 (nilai r hitung > r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa keenam pertanyaan untuk mengukur transparansi (variabel X), semuanya dinyatakan valid.

Tabel 4.2 Uji validitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel = 0,325	Keputusan
Efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)	1	0.718	0,320	Valid
	2	0.609	0,320	Valid
	3	0.618	0,320	Valid
	4	0.635	0,320	Valid
	5	0.633	0,320	Valid
	6	0.439	0,320	Valid
	7	0.787	0,320	Valid
	8	0.709	0,320	Valid

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Tabel 4.2 tentang uji validitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) yang berisi delapan pertanyaan yang diberikan kepada responden, dapat diketahui hasilnya yakni semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai t

tabel = 0,320 (nilai r hitung $>$ r tabel), sehingga dapat diputuskan bahwa kedelapan pertanyaan untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), semuanya dinyatakan valid.

4.1.2 Hasil uji reliabilitas

Kuesioner yang dinyatakan valid harus diuji lagi reliabilitasnya. Reliabilitas kuesioner bermakna adanya kepercayaan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Dengan demikian, kuesioner yang dikatakan reliabel, jika jawaban responden terhadap pertanyaan senantiasa konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten, jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha, dimana tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel lebih besar dari 0,60 atau 60%. Berikut hasil uji reliabilitas kuesioner..

Tabel 4.3 Uji reliabilitas transparansi (variabel X)

Cronbach's Alpha	N of Items (jumlah pertanyaan)
0.894	6

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa ada enam pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengukur transparansi (variabel X), dan berdasarkan hasil pengujian melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,894. Nilai ini lebih besar dari 0,60 ($Cronbach's\ Alpha = 0,894 > 0,60$). Hal ini berarti semua pertanyaan transparansi (variabel X) dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Uji reliabilitas efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)

Cronbach's Alpha	N of Items (jumlah pertanyaan)
0.875	8

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ada delapan pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), dan berdasarkan hasil pengujian melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,875. Nilai ini lebih besar dari 0,60 ($Cronbach's\ Alpha = 0,875 > 0,60$). Hal ini berarti semua pertanyaan tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

Dengan demikian, semua pertanyaan yang diberikan kepada responden sebanyak 40 orang, untuk mengukur transparansi (variabel X) dan efektivitas

penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), dinyatakan valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Analisis Deskriptif

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Adapun deskripsi dari tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat diuraikan berikut ini.

4.3.1 Transparansi (variabel X)

Transparansi dalam pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sangat diperlukan, agar masyarakat yang berhak menerima dapat mengetahui tentang persyaratan yang harus mereka siapkan. Hal ini disebabkan karena transparansi itu merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan dapat membangun kepercayaan melalui kemudahan akses informasi yang memadai untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah akan memungkinkan semua pelayanan publik akan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Berikut akan disajikan tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden, setelah diolah diperoleh nilai masing-masing indikator dari transparansi (X) sebagai berikut:

Tabel 4.5 Aparatur kelurahan memberi informasi
kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	16	40.0
Setuju	16	40.0
Ragu-ragu	7	17.5
Kurang setuju	1	2.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan, sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 16 responden (40,0%) menjawab setuju, 7 responden (17,5%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah sangat baik memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan.

Tabel 4.6 Aparatur kelurahan menjelaskan kepada masyarakat
persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa
persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	13	32.5
Setuju	20	50.0
Ragu-ragu	6	15.0
Kurang setuju	1	2.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan menjelaskan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan

mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial, sebanyak 13 responden (32,5%) menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab setuju, 6 responden (15,0%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa aparat kelurahan sudah menjelaskan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial.

Tabel 4.7 Aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	16	40.0
Setuju	13	32.5
Ragu-ragu	10	25.0
Kurang setuju	1	2.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami, sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 13 responden (32,5%) menjawab setuju, 10 responden (25,0%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa aturan penerima bantuan sosial sudah sangat mudah dipahami.

Tabel 4.8 Prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	15	37.5
Setuju	15	37.5
Ragu-ragu	9	22.5
Kurang setuju	1	2.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami, sebanyak 15 responden (37,5%) menjawab sangat setuju, 15 responden (37,5%) menjawab setuju, 9 responden (22,5%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa prosedur layanan bantuan sosial sudah sangat mudah dipahami.

Tabel 4.9 Ada informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme)

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	12	30.0
Setuju	16	40.0
Ragu-ragu	9	22.5
Kurang setuju	3	7.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai ada informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme), sebanyak 12 responden (30,0%) menjawab sangat setuju, 16 responden (40,0%) menjawab setuju, 9 responden (22,5%) menjawab ragu-ragu, dan 3 responden (7,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa sudah ada informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme).

Tabel 4.10 Ada informasi tentang daftat nama-nama penerima bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	12	30.0
Setuju	20	50.0
Ragu-ragu	7	17.5
Kurang setuju	1	2.5
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai ada informasi tentang daftat nama-nama penerima bantuan sosial, sebanyak 12 responden (30,0%) menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab setuju, 7 responden (17,5%) menjawab ragu-ragu, dan 1 responden (2,5%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa sudah ada informasi tentang daftat nama-nama penerima bantuan sosial.

4.3.2 Efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)

Bantuan sosial merupakan salah bentuk pelayanan publik pemerintah Kelurahan Liluwo kepada masyarakat yang kondisi ekonpminya kurang beruntung. olehnya itu, penyaluran abntuan sosial harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran. Untuk mengkaji efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat, akan disajikan tanggapan responden dalam bentul tabel distribusi frekuensi.

Tabel 4.11 Aparatur kelurahan memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	16	40.0
Setuju	19	47.5
Ragu-ragu	5	12.5
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 19 responden (47,5%) menjawab setuju, dan 5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial.

Tabel 4.12 Aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	16	40.0
Setuju	19	47.5
Ragu-ragu	5	12.5
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 16 responden (40,0%) menjawab sangat setuju, 19 responden (47,5%) menjawab setuju,

5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial.

Tabel 4.13 Aparatur kelurahan bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	14	35.0
Setuju	20	50.0
Ragu-ragu	6	15.0
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak 14 responden (35,0%) menjawab sangat setuju, 20 responden (50,0%) menjawab setuju, 6 responden (15,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparatur kelurahan sudah bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial

Tabel 4.14 Aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	17	42.5
Setuju	15	37.5
Ragu-ragu	8	20.0
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial, sebanyak

17 responden (42,5%) menjawab sangat setuju, 15 responden (37,5%) menjawab setuju, dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa aparaturnya sudah sangat tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial.

Tabel 4.15 Warga masyarakat penerima bantuan sosial
memang warga yang memenuhi persyaratan

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	14	35.0
Setuju	21	52.5
Ragu-ragu	5	12.5
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang memenuhi persyaratan, sebanyak 14 responden (35,0%) menjawab sangat setuju, 21 responden (52,5%) menjawab setuju, dan 5 responden (12,5%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang sudah memenuhi persyaratan.

Tabel 4.16 Warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	8	20.0
Setuju	17	42.5
Ragu-ragu	11	27.5
Kurang setuju	4	10.0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu, sebanyak 8 responden (20,0%) menjawab sangat setuju, 17 responden (42,5%) menjawab setuju, 11 responden (27,5%) menjawab ragu-ragu, dan 4 responden (10,0%) menjawab kurang setuju. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat sudah menerima bantuan sosial tepat waktu.

Tabel 4.17 Warga masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	14	35.0
Setuju	18	45.0
Ragu-ragu	8	20.0
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah, sebanyak 14 responden (35,0%) menjawab sangat setuju, 18 responden (45,0%) menjawab setuju, dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat sudah terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah.

Tabel 4.18 Warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat setuju	18	45.0
Setuju	14	35.0
Ragu-ragu	8	20.0
Kurang setuju	0	0
Tidak setuju	0	0
Jumlah	40	100%

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin, sebanyak 18 responden (45,0%) menjawab sangat setuju, 14 responden (35,0%) menjawab setuju, dan 8 responden (20,0%) menjawab ragu-ragu,. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat sudah dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin.

4.4 Pengujian Hipotesis

1. Analisis korelasi dan pengujian hipotesis

Sebelum menguji pengaruh atau kontribusi transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, maka terlebih dahulu diuji korelasinya. Analisis korelasi dimaksudkan untuk menentukan hubungan dan besarnya hubungan antara dua variabel yang diteliti yakni transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y).

Untuk mengetahui hubungan dan jenis hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dilakukan uji analisis korelasi product moment. Berikut hasil analisis korelasi terhadap tata hubungan dan tingkat pengaruh antara kedua variabel penelitian.

Tabel 4.19. Korelasi (correlations)

		Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	Transparansi (X)
Pearson Correlation	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	1.000	.864
	Transparansi (X)	.864	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	.	.000
	Transparansi (X)	.000	.
N	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	40	40
	Transparansi (X)	40	40

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Dengan menggunakan analisis korelasi sebagaimana tabel korelasi di atas, terlihat bahwa besaran korelasi $r = 0,864$, dan jumlah N atau sampel sebesar 40 orang. Dengan demikian maka r hasil perhitungan adalah 0,864. Selanjutnya, tabel tingkat signifikansi antara transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), untuk mengetahui tingkat signifikansi antara kedua variabel dan besaran r^2 .

Tabel 4.20 Tingkat signifikansi antara transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.740	2.20346

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hubungan (korelasi) antara transparansi (variabel X) dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) adalah $r = 0,864$, dengan $r^2 = 0,747$ (74,7%), maka dapat disimpulkan bahwa 74,7% dengan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, dapat diterangkan oleh transparansi (variabel X).

Dengan demikian, apabila transparansi (variabel X) ditingkatkan kualitasnya, maka setiap unit kenaikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) sebesar 0,747 (74,7%). Ramalan yang dikembangkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, apabila transparansi (variabel X) dinaikkan sebesar 10 kali, maka efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) akan bertambah sebesar 0,747 (74,7%). Hal ini memungkinkan untuk perbaikan dan penataan kembali transparansi termasuk efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) di Kelurahan Liluwo.

Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel transparansi (variabel X) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y). Dengan demikian, dari hasil penelitian ini terbukti

bahwa pelaksanaan transparansi dan mewujudkan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo. Untuk itu, pemerintah kelurahan Liluwo harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, karena dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial tersebut, sebagai dikatakan oleh Krina (2013) bahwa transparansi merupakan prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi karena merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan pelayanan yang disediakan kepada masyarakat.

2. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana merupakan peramalan yang berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) apabila variabel transparansi (variabel X) dapat diketahui. Setelah melakukan uji analisis regresi terhadap dua variabel penelitian, yaitu transparansi (variabel X) dan efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), sedangkan hasil penelitian dengan uji regresi sederhana didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.21. Koefisien transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.589	2.175		4.867	.000
Transparansi (X)	.928	.088	.864	10.588	.000

a. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)

Sumber data: Olahan kuesioner, Oktober 2023

Pada tabel 4.21, menunjukkan bahwa persamaan regresi sederhana antara transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y), adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 10,589 + 0,928 \cdot X$$

Konstanta sebesar 10,589 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari transparansi (variabel X), maka efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) adalah 10,589. Koefisien regresi sebesar 0,928 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai transparansi (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,928.

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari transparansi (variabel X) terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat (variabel Y) sebagai berikut.

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

Ha: Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau ($0,05 \leq Sig$), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau ($0,05 \geq Sig$), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Keputusan pengujian:

Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.21 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas $Sig = 0,000$ lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,05 > 0,000$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

Ha : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah.

Dalam memberikan pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat, aparaturnya pemerintah kelurahan harus memenuhi kebutuhan dan dapat melindungi kepentingan

masyarakatnya. Bentuk layanan yang diberikan oleh aparaturnya kepada masyarakat berdasarkan good governance harus sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, didalam pelayanan bantuan sosial sangat diperlukan adanya transparansi pelayanan publik, untuk menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

4.5 Pembahasan

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bukan merupakan hal baru dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kelurahan. Dalam beberapa kondisi terjadinya musibah atau bencana alam atau bencana wabah penyakit di suatu daerah, pemerintah kelurahan sering hadir untuk meringankan beban masyarakat, akan tetapi respon masyarakat yang terdampak bencana masih banyak menimbulkan kontroversi terkait penyaluran bantuan sosial tersebut. Berbagai kekecewaan muncul di masyarakat yang terdampak bencana karena penyalurannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena bantuan sosial yang disalurkan terkadang tidak tepat sasaran, adanya dugaan masyarakat atas penyaluran atau pembagian bantuan sosial yang tidak merata, serta kurangnya transparansi pemerintah kelurahan terkait bantuan sosial tersebut.

Pemerintah kelurahan terus berupaya mencari cara agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Oleh karena itu, perbaikan data penerima bantuan sosial harus terus dilakukan, agar penyalurannya dapat tepat sasaran dan merata. Dengan demikian, ketersediaan data merupakan kunci pokok atau solusi atas penyelesaian permasalahan

yang sering muncul pada setiap penyaluran bantuan sosial, apakah itu bansos berupa barang atau jasa, transfer uang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Liluwo merupakan salah satu pelayanan yang banyak menimbulkan permasalahan, terutama karena persoalan data masyarakat penerima yang kurang valid. Kurang validnya data penerima dan kurang meratanya pendistribusian bantuan sosial merupakan pokok permasalahannya. Hasil penelitian tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo, menunjukkan hasil transparansi dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat sebesar 0,747 (74,7%). Hal ini berarti bahwa pemerintah Kelurahan Liluwo sudah baik dalam menerapkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kelurahan Liluwo sudah terbuka dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi sudah kuat mempengaruhi terwujudnya efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat, namun masih terdapat aspek tertentu yang mendapat tanggapan kurang maksimal dari responden, seperti aturan dan prosedur penerima bantuan sosial masih ada warga yang kurang memahami, kemudian informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme), serta informasi tentang daftar nama-nama penerima bantuan sosial. Hasil penelitian

Noerkaisar (2021) terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial menunjukkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah belum berjalan efektif karena masih terdapat permasalahan yang ditemukan di hampir seluruh lini jaring pengaman sosial, baik dari hulu sampai ke hilir. Permasalahan dari hulu, yakni persoalan yang timbul terkait validitas data penerima bantuan sosial. Adapun permasalahan dari hilir dapat ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial yang tidak merata, proses distribusi yang memerlukan waktu lama untuk sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, penyelewengan dana, pungutan liar, dan adanya pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima penerima manfaat. Dengan demikian, ketidakhandalan basis data penerima bantuan masih merupakan faktor utama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dapat memberikan bermacam manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sosial, salah satunya ialah manajemen dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, kalau dikaji pada aspek persyaratan teknis dan administratif pelayanan bantuan sosial memiliki kepastian pelayanan secara jelas kepada masyarakat, sehingga lurah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan ditetapkan secara formal berdasarkan surat keputusan. Manfaat lainnya yakni, transparansi pelayanan bantuan sosial bagi lurah selaku pejabat yang berwenang dan atau menyelesaikan keluhan, serta adanya

komunikasi yang baik dalam melayani. Transparansi pelayanan juga berguna sebagai standar pelayanan publik yang realitis dan dipublikasikan pada masyarakat.

Kemudian dari aspek efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat, masih ditemukan aspek yang kurang maksimal, yakni warga masyarakat menerima bantuan sosial kurang tepat waktu. Kurniawan (2018) mengatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Efektivitas juga merupakan hubungan derajat keberhasilan suatu operasi pada wilayah publik. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang menjadi sasaran utama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat sebesar 0,747 (74,7%) di Kelurahan Liluwo. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kelurahan Liluwo sudah baik dalam mewujudkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Persoalan utama terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial yakni keakuratan data tentang masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Perwujudan transparansi dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial oleh instansi pemberi pelayanan merupakan suatu keharusan, karena mengingat transparansi dalam menghilangkan korupsi dan pungutan liar oleh oknum aparat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini terjadi karena dalam transparansi pelayanan bantuan sosial akan tersedia informasi yang lengkap terkait pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat, seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya yang dikenakan kalau ada, batas waktu pelayanan, dan lain-lain.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang peneliti dapat berikan, yakni:

1. Pemerintah Kelurahan Liluwo sebaiknya mendata ulang warga masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, karena hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, masih terdapat warga masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, namun belum mendapat bantuan sosial karena belum di data oleh ketua RTnya. Disisi lain, ada beberapa warga masyarakat yang mendapat dua kali bantuan sosial, padahal aturan tidak memperbolehkannya.
2. Pemerintah Kelurahan Liluwo sebaiknya berkoordinasi ulang dengan para tokoh masyarakat untuk mendata ulang warganya yang memang berhak menerima bantuan sosial, namun belum menerima. Hal ini dikarenakan ketua RT belum maksimal melakukan pendataan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2016. Manajemen pemerintah daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- _____. 2017. Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktis. Jakarta. Rineka Cipta.
- Beni, P. 2016. Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. Jakarta. Taushia
- Dwiyanto, Agus. 2010. Mewujudkan Good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2019. Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Bandung. Haji masagung.
- Iqbal, Zamir. 2015. Pengantar Keuangan Islam. Jakarta. Fajar Interpretama Mandiri.
- Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, A. 2018. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaruan.
- Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal akuntansi pemerintah.
- Muis. 2020. Transparansi kebijakan publik sebagai strategi nasional dalam menanggulangi pandemi covid-19“. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(5). doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15317.
- Mulyadi, Deddy dan Gedeona, Hendrikus T. 2017. demokrasi, governance, dan ruang publik, memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan proses kebijakan publik. Bandung. Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. Kybernology. Jakarta. Rineka Cipta.

- Nisak, A. 2017. Penerapan Akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba (studi kasus masjid agung al-umaraini dan partai keadilan sejahterta).
- Noerkaisar, Noni. 2021. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Purwanto, I. 2020. Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid 19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Riduwan. 2020. Metode dan teknik menyusun tesis. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sianturi, H. 2017. Kedudukan keuangan daerah dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial berdasarkan perspektif keuangan negara. Jurnal Wawasan Yuridika, (1).
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2016. Metode penelitian survai. Jakarta. LP3ES,
- Sitanggang, B, dkk. 2014. Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di kabupaten kubu raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN.
- Wibawa, Samodra. 2014. Beberapa konsep untuk administrasi negara. Yogyakarta. Liberty.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5 (1).

TRANSPARANSI (variabel X)

No. Urut	1	2	3	4	5	6	Total
1	4	5	4	4	4	5	26
2	4	5	3	4	5	5	26
3	3	4	4	4	3	3	21
4	5	4	4	5	4	3	25
5	5	4	5	5	5	4	28
6	4	4	5	5	5	5	28
7	5	5	5	5	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	5	4	4	5	5	28
10	5	5	5	5	4	5	29
11	4	4	5	5	5	5	28
12	4	4	5	5	5	4	27
13	5	4	3	3	2	4	21
14	4	4	5	5	5	4	27
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	5	5	4	4	4	5	27
18	4	4	5	5	4	4	26
19	5	4	5	5	5	4	28
20	5	5	4	4	5	5	28
21	5	5	5	5	4	4	28
22	5	5	5	5	4	4	28
23	5	4	3	3	3	4	22
24	5	5	5	5	5	5	30
25	2	3	3	3	2	2	15
26	3	4	3	2	3	3	18
27	5	5	5	4	5	5	29
28	3	2	2	3	2	3	15
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	5	4	5	26
31	4	5	4	5	3	4	25
32	5	4	4	3	4	4	24
33	4	5	5	4	5	5	28
34	4	4	5	4	4	4	25
35	3	3	3	4	3	4	20
36	3	3	3	3	4	4	20
37	5	4	5	4	3	4	25
38	4	3	3	3	3	3	19
39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	3	3	3	18

Uji validitas dan reliabilitas variabel X

Scale: All Variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.894	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	20.3250	11.917	.646	.500	.887
VAR00002	20.3750	11.779	.741	.633	.873
VAR00003	20.4000	10.964	.777	.735	.866
VAR00004	20.4000	11.528	.695	.636	.879
VAR00005	20.5750	10.866	.744	.655	.872
VAR00006	20.4250	11.892	.708	.649	.878

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT
(variabel Y)**

No. Urut	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	3	4	5	4	5	2	4	5	32
2	4	5	4	5	4	3	4	5	34
3	4	4	4	4	4	2	3	3	28
4	4	5	4	5	4	3	5	4	34
5	4	5	5	5	4	3	5	4	35
6	5	4	5	5	5	4	4	5	37
7	5	5	5	5	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	32
9	5	4	4	5	4	5	4	5	36
10	5	4	5	5	5	5	5	4	38
11	4	4	5	5	4	5	4	5	36
12	4	4	5	5	4	4	5	5	36
13	4	5	3	5	4	2	4	3	30
14	5	5	4	4	4	5	5	5	37
15	4	4	4	3	4	4	4	4	31
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	5	5	4	5	5	5	5	5	39
18	5	5	5	5	4	4	5	5	38
19	5	5	4	4	5	5	4	5	37
20	5	4	5	5	5	4	4	5	37
21	5	5	4	4	5	4	5	5	37
22	5	5	4	4	5	4	5	5	37
23	4	5	4	3	5	3	4	5	33
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	3	3	3	3	4	3	3	3	25
26	3	3	3	3	3	3	3	3	24
27	4	4	4	4	4	4	4	3	31
28	4	3	4	3	3	4	3	3	27
29	5	5	4	4	4	4	4	4	34
30	4	4	4	4	5	4	5	4	34
31	4	4	5	5	4	5	4	4	35
32	5	4	5	4	5	3	5	5	36
33	5	5	4	4	5	4	5	4	36
34	4	5	5	5	5	3	5	5	37
35	5	4	5	4	4	3	4	5	34
36	3	4	3	3	3	3	3	3	25
37	4	4	4	5	4	4	4	4	33
38	4	4	3	4	3	4	3	4	29
39	3	3	4	3	4	3	3	3	26
40	4	3	3	3	3	2	3	4	25

Uji validitas dan reliabilitas variabel Y

Scale: All Variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	29.0500	14.510	.718	.571	.851
VAR00002	29.0500	15.023	.609	.609	.862
VAR00003	29.1250	14.933	.618	.574	.861
VAR00004	29.1000	14.400	.635	.533	.859
VAR00005	29.1000	15.015	.633	.539	.860
VAR00006	29.6000	14.810	.439	.352	.886
VAR00007	29.1750	13.840	.787	.692	.843
VAR00008	29.0750	13.969	.709	.549	.851

REKAPITULASI NILAI TOTAL

Nomor Urut Responden	Transparansi (variabel X)	Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (variabel Y)
1	26	32
2	26	34
3	21	28
4	25	34
5	28	35
6	28	37
7	28	36
8	24	32
9	28	36
10	29	38
11	28	36
12	27	36
13	21	30
14	27	37
15	24	31
16	24	32
17	27	39
18	26	38
19	28	37
20	28	37
21	28	37
22	28	37
23	22	33
24	30	40
25	15	25
26	18	24
27	29	31
28	15	27
29	24	34
30	26	34
31	25	35
32	24	36
33	28	36
34	25	37
35	20	34
36	20	25
37	25	33
38	19	29
39	18	26
40	18	25

DISTRIBUSI FREKUENSI:
Transparansi (variabel X)
Frequency Table

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.5	2.5	2.5
	3.00	7	17.5	17.5	20.0
	4.00	16	40.0	40.0	60.0
	5.00	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.5	2.5	2.5
	3.00	6	15.0	15.0	17.5
	4.00	20	50.0	50.0	67.5
	5.00	13	32.5	32.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.5	2.5	2.5
	3.00	10	25.0	25.0	27.5
	4.00	13	32.5	32.5	60.0
	5.00	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.5	2.5	2.5
	3.00	9	22.5	22.5	25.0
	4.00	15	37.5	37.5	62.5
	5.00	15	37.5	37.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	7.5	7.5	7.5
	3.00	9	22.5	22.5	30.0
	4.00	16	40.0	40.0	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.5	2.5	2.5
	3.00	7	17.5	17.5	20.0
	4.00	20	50.0	50.0	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

DISTRIBUSI FREKUENSI:**Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (variabel Y)****Frequency Table****pertanyaan 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	12.5	12.5	12.5
	4.00	19	47.5	47.5	60.0
	5.00	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	12.5	12.5	12.5
	4.00	19	47.5	47.5	60.0
	5.00	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	15.0	15.0	15.0
	4.00	20	50.0	50.0	65.0
	5.00	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	20.0	20.0	20.0
	4.00	15	37.5	37.5	57.5
	5.00	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	12.5	12.5	12.5
	4.00	21	52.5	52.5	65.0
	5.00	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	10.0	10.0	10.0
	3.00	11	27.5	27.5	37.5
	4.00	17	42.5	42.5	80.0
	5.00	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	20.0	20.0	20.0
	4.00	18	45.0	45.0	65.0
	5.00	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	20.0	20.0	20.0
	4.00	14	35.0	35.0	55.0
	5.00	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	33.3250	4.32279	40
Transparansi (X)	24.5000	4.02556	40

Correlations

		Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	Transparansi (X)
Pearson Correlation	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	1.000	.864
	Transparansi (X)	.864	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	.	.000
	Transparansi (X)	.000	.
N	Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)	40	40
	Transparansi (X)	40	40

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.740	2.20346

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X)

b. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	544.276	1	544.276	112.101	.000 ^a
	Residual	184.499	38	4.855		
	Total	728.775	39			

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X)

b. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.589	2.175		4.867	.000
	Transparansi (X)	.928	.088	.864	10.588	.000

a. Dependent Variable: Penyaluran bantuan sosial masyarakat (Y)

Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

N (sampel)	taraf signif		N (sampel)	taraf signif		N (sampel)	taraf signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	37	0,325	0,418	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	38	0,320	0,413	60	0,254	0,330

Sumber : Riduwan (2018:372)

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah

Petunjuk:

1. Mohon dijawab dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan hati nurani bapak/ibu.
2. Kuesioner ini hanya diperuntukkan untuk penyelesaian penulisan skripsi, dan tidak ada kepentingan lain.

Penilaian pilihan jawaban:

Sangat setuju (SS) = 5
 Setuju (S) = 4
 Ragu-ragu (RR) = 3
 Kurang setuju (KS) = 2
 Tidak setuju (TS) = 1

Pertanyaan:

TRANSPARANSI (Variabel X)

Pertanyaan		SS	S	RR	KS	TS
1	Aparatur kelurahan memberi informasi kalau ada bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan					
2	Aparatur kelurahan menjelaskan kepada masyarakat persyaratan yang harus dipenuhi dan mengapa persyaratan ini diperlukan dalam proses layanan bantuan sosial					
3	Aturan penerima bantuan sosial mudah dipahami					
4	Prosedur layanan bantuan sosial mudah dipahami					
5	Ada informasi tentang proses pelayanan bantuan sosial (termasuk persyaratan, durasi, dan mekanisme)					
6	Ada informasi tentang daftar nama-nama penerima bantuan sosial					

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT (Variabel Y)

Pertanyaan		SS	S	RR	KS	TS
1	Aparatur kelurahan memahami peran dan tanggungjawabnya dalam penyaluran bantuan sosial					
2	Aparatur kelurahan dapat bekerja dengan baik dalam penyaluran bantuan sosial					
3	Aparatur kelurahan bersikap netral dalam penyaluran bantuan sosial					
4	Aparatur kelurahan tidak diskriminatif (pilih kasih) dalam penyaluran bantuan sosial					
5	Warga masyarakat penerima bantuan sosial memang warga yang memenuhi persyaratan					
6	Warga masyarakat menerima bantuan sosial tepat waktu					
7	Warga masyarakat terbantu dengan adanya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah					
8	Warga masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial semaksimal mungkin					

ABSTRAK

MUTMAINNAH PUTRI NANSER. S2119012. PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh transparansi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial masyarakat di Kelurahan Liluwo. Persoalan utama terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial yakni keakuratan data tentang masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial.

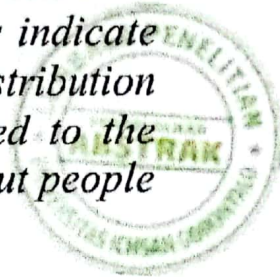
Kata kunci: transparansi, efektivitas bantuan sosial

ABSTRACT

MUTMAINNAH PUTRI NANSER. S2119012. THE EFFECT OF TRANSPARENCY ON THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL ASSISTANCE DISTRIBUTION TO THE COMMUNITY AT LILUWO URBAN VILLAGE IN KOTA TENGAH SUBDISTRICT

This research aims to determine to what extent the effect of transparency on the effectiveness of social assistance distribution to the community at Liluwo Urban Village in Kota Tengah Subdistrict. This research applies a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study is 40 people. The data analysis method employs simple linear regression. The research results indicate that transparency contributes to the effectiveness of social assistance distribution to the community at Liluwo Urban Village. The main problem related to the effectiveness of social assistance distribution is the accuracy of data about people who meet the requirements to receive social assistance.

Keywords: transparency, social assistance effectiveness



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4709/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023

Tempat : -

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Lurah Liluwo

di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Putri Nanser
NIM : S2119012
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA TENGAH
KELURAHAN LILUWO**

Alamat : Jl. Selayar, No.94, Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 079/PEM-TRANTIBUM-LLW-DIG/939/XI/2023

g bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTIEN FAJAR P. HARRAS, S.STP
NIP : 19890108 201206 1 001
Jabatan : LURAH LILUWO

gan ini menerangkan kepada :

Nama : MUTMAINNAH PUTRI NANSER
NIK : 7571065306000001
Tempat/Tgl.Lahir : GORONTALO, 13 JUNI 2000
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH
Alamat : JL. KH. AGUS SALIM, RT 001/ RW 003 KELURAHAN
DULALOWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

wa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul "PENGARUH
ANSPARANSI TERHADAP EFEKTIFITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SYARAKAT " dari tanggal 03 OKTOBER 2023 sampai dengan tanggal 31
SEMBER 2023 di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan **DIPERGUNAKAN
PERLUNYA**



Gorontalo, 29 November 2023
LURAH LILUWO

MARTIEN FAJAR P. HARRAS, S.STP
NIP. 19890108 201206 1 001



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 259/FISIP-UNISAN/S-BP/XII /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MUTMAINNAH PUTRI NANSER
NIM : S2119012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas
Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat
Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **12 %** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI VII. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2023

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,Msi
NIDN. 0913027101

Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

KRIPSI. MUTMAINNAH PN.doc

AUTHOR

MUTMAINNAH PUTRI NASSER

WORD COUNT

483 Words

CHARACTER COUNT

64035 Characters

PAGE COUNT

10 Pages

FILE SIZE

308.5KB

SUBMISSION DATE

Nov 20, 2023 6:27 AM GMT+7

REPORT DATE

Nov 20, 2023 6:28 AM GMT+7

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

12% Internet database

Crossref database

2% Submitted Works database

- 3% Publications database

- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

Cited material

- Quoted material

- Small Matches (Less than 30 words)

BIODATA

Nama : Mutmainnah Putri Nanser
NIM : S2119012
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 Juni 2000
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orangtua
Ayah : Zainudin Nanser
Ibu : Hasna Lihawa

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN 86 Kota Gorontalo	Kota gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	MTs Al-Yusra Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	MAN 1 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah